

# **ANALISIS KOALISI LUKMAN EDY DAN SURYADI KHUSAINI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2013**

**Disusun oleh**

**HADI YULIANSYAH**

**DAN**

**ISHAK**

## **Abstract**

A political party is an organized group, whose members have orientation, values and ideals are the same. Political Recruitment is the process by which individuals enroll warrant or to occupy a position. Recruitment is a two way process , and its nature can be formal or informal. Recruitment candidates are strongly associated with the selection of leadership, both internal party leadership and the broader national leadership. The coalition formation occurs at the end of the second second, at which time the Indonesian Democratic Party of Struggle has not determined what his choice would form a coalition with the party. At the end of the second second official register at the County Election Commission on Wednesday, May 29, 2013 on Pekanbaru.

Lukman Edy is a young political leaders who have served at the level of the House of Representatives ( DPR RI ) 2 Riau electoral district , has held a strategic position in the CBA , the Secretary-General ( Secretary General ) and the position of Minister of Rural Development. His advancement to the Governor of Riau seats into its own political record for the Riau area on the General Election in 2013 has 5 pairs Candidates for Governor and Deputy Governor and a figure advanced young people as a candidate for governor. Suryadi Khusaini is Chairman of the Indonesian Democratic Party of Struggle ( PDI-P ), this figure had also run for vice-governor pairs with Chaidir in 2008.

***Keyword: Political Party, Political Recruitment, Coalition***

## **PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang Masalah**

Dalam demokrasi modern selalu mengandalkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Upaya menegakkan demokrasi tentulah dibutuhkan sarana atau saluran politik yang

koheren dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal tersebut partai politik adalah salah satu sarana yang dimaksud, di mana partai politik mempunyai ragam fungsi, platform, dan dasar pemikiran. Hal itulah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai demokrasi tidaknya suatu pemerintahan (Koirudin, 2004:1).

Rekrutmen calon berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting, karena partai merupakan medium salah satu bakal calon kepala daerah untuk dapat maju dalam pemilihan umum kepala daerah. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur pada tanggal 4 bulan September tahun 2013. Beberapa calon Gubernur Riau yang diusungkan oleh setiap partai, maka saya tertarik dengan salah satu partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau.

Dari beberapa Partai yang mengusung calon gubernurnya, hampir seluruh calon yang akan bertarung dalam pesta demokrasi di Provinsi Riau adalah ketua umum dari setiap partai-partainya, sementara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau bukan dari ketua Umum tersebut. Inilah yang menjadi daya tarik saya untuk mengambil masalah dalam sistem perekrutan calon yang direkrut oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau. Kemudian Mengapa harus Lukman Edy yang direkrut oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bakal calon Gubernur Riau yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Riau bulan september tahun 2013, Apalagi perolehan suara PKB tidak cukup untuk mengusung sendiri kadernya dan harus melakukan koalisi dengan partai lainnya. Lalu bargaining politik apa yang dilakukan oleh Lukman Edy terhadap PDI Perjuangan sehingga mau berkoalisi, padahal perolehan suara PDI Perjuangan jauh lebih besar dari PKB.

Terbentuknya koalisi ini terjadi pada detik detik akhir, dimana pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan pilihannya dengan partai apa akan berkoalisi. Pada saat detik detik akhir resmi mendaftarkan diri ke KPU Riau pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 di Jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Lukman Edy merupakan tokoh politik muda yang telah berkiprah di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari dapil Riau 2, pernah menjabat posisi strategis di PKB yaitu Sekretaris Jendral (Sekjend) dan posisi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Majunya beliau untuk memperebutkan kursi Gubernur Riau menjadi catatan politik tersendiri bagi daerah Riau yang pada Pemilukada tahun 2013 memiliki 5 pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan ada sosok kaum muda yang maju sebagai Calon Gubernur. Suryadi Khusaini merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), tokoh ini pernah juga mencalonkan jadi wakil gubernur berpasangan dengan Chaidir pada tahun 2008 namun pada masa tersebut beliau kalah dari calon incumbent saat itu Rusli Zainal.

#### **b. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan proposal penelitian yaitu “Apa yang menjadi faktor Pendorong terbangunnya koalisi Lukman Edy dengan Suryadi Khusaini?”

#### **c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor Pendorong terbangunnya Koalisi Lukman Edy dan Suryadi Khusaini.
2. Mendeskripsikan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur Riau Putaran Pertama.

##### **b. Kegunaan Penelitian**

###### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin mengetahui faktor-faktor terbangunnya koalisi Lukman Edy dan Suryadi Khusaini pada Pemilihan Gubernur tahun 2013 dan sebagai tambahan literatur atau bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum kepala daerah.

###### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan pemikiran bagi PKB dan PDI Perjuangan untuk dapat merekrut dan menyeleksi calon gubernur yang akan datang sehingga mekanisme pencalonan kepala daerah lebih terbuka.

#### **c. Kerangka Teoritis**

##### **1. Rekrutmen Politik**

Rekrutmen Politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah, karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi tertentu.

Dengan cara yang sama, perekrutan itu bisa formal, kalau para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi atau pemilihan. Dan disebut dengan informal apabila para individunya direkrut secara *prive* (sendirian) tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional tadi. Peristiwa sedemikian ini juga mencakup beberapa pertimbangan apakah mereka yang mengendalikan jabatan tadi bisa dengan tegas merupakan kelompok politik tertentu atau merupakan kelompok elit (Michael Rush & Philip Althoff, 2002: 23).

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan

pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat yang berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit politik yang mampu melaksanakan peranannya, keberlangsungan hidup sistem politik terancam (Ramlan Surbakti, 1992: 118).

## **2. Sistem Rekrutmen Politik**

Menurut Alwis dalam Wazni (2010: 24) mengenai perihal pelaksanaan rekrutmen politik pada umumnya dikenal dua cara rekrutmen, pertama perekrutan terbuka bagi seluruh warga negara. Seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Kedua perekrutan tertutup yaitu, bahwa individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan.

Dalam perekrutan tertutup ini, perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah (keturunan atau keluarga) dengan penguasa atau individu tadi merupakan kawan-kawan akrab pihak penguasa atau mungkin individu-individu tadi berasal dari sekolah yang sama (satu almamater) dengan penguasa. Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan terbatas sifatnya. Disamping itu para ahli juga membagi rekrutmen secara rasional dan irrasional (tradisional) yang pada hakikatnya sama pengertian dengan rekrutmen terbuka dan tertutup.

## **3. Rekrutmen Calon Kepala Daerah**

Dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon, partai politik memberlakukan sistem atau mekanisme yang berbeda-beda, antara lain sistem pemilihan tertutup dan sistem konvensi (Joko J. Prihatmoko, 2005: 238-239).

### **1. Sistem pemilihan tertutup**

Sistem pemilihan tertutup adalah sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem. Istilah ini “variasi sistem” merujuk pada mekanisme penentuan akhir bakal calon yang mengikuti kompetisi pilkada langsung atau yang akan menjadi calon. Partai-partai politik yang demokratis, dengan sistem kepemimpinan demokratis pula, umumnya menetapkan bahwa penentu akhir pencalonan adalah pengurus partai politik setempat. Sedangkan partai-partai politik konservatif, dengan sistem kepemimpinan yang bergantung pada figure, pencalonan akhir ditentukan oleh pengurus pusat.

### **2. Sistem konvensi**

Sistem rekrutmen calon yang sangat populer di negara-negara demokrasi adalah sistem konvensi. Sistem konvensi dilakukan

dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan atau anggota partai. Kelebihan sistem konvensi terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui prose kampanye internal partai dan pendidikan politik yang ditawarkan (debat public, penyampaian visi dan misi, dan lain-lain). Sistem konvensi sangat efektif bagi partai kader, dan sebaliknya kurang efektif bagi partai massa.

#### **4. Partai Politik**

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (Miriam Budiarjo, 2008: 403). Di negara yang demokratis menurut Miriam Budiarjo, partai politik juga memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

1. **Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik**  
Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berfungsi untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
2. **Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik**  
Dalam ilmu politik, partai politik sebagai sarana bersosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat, dalam memenangkan calon dalam pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, partai harus menciptakan image bahwa ia mementingkan kepentingan umum.
3. **Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik**  
Dari keempat fungsi partai politik, fungsi rekrutmen inilah yang paling menentukan dalam mendukung pasangan calon. Karena partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk aktif dalam kegiatan politik.
4. **Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik**  
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan suatu hal yang wajar, jadi fungsi partai politik disini ia harus dapat mengatasinya supaya tidak terjadi konflik (Miriam Budiarjo, 2008: 405).

Suatu partai politik juga harus mampu bersaing untuk dapat berkompetisi secara baik dan sehat apalagi dalam suatu pemilihan umum yang bebas dan demokratis, ditentukan oleh dua faktor. Pertama faktor yang bersifat internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam partai politik itu sendiri. Faktor internal dapat berupa konsolidasi partai, rekrutmen dan kaderisasi anggota partai politik. Kedua, faktor yang bersifat eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh partai politik itu. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah pelaksanaan pemilu dan persepsi masyarakat terhadap partai

politik yang bersangkutan dan sistem politik yang berlangsung (Syamsudin Haris, 1991:133).

**e. Defenisi Konseptual**

1. Partai politik yaitu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan kepentingan dalam bidang politik serta merupakan peserta pemilu.
2. PKB adalah merupakan singkatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu organisasi partai politik peserta pemilu dan merupakan partai yang cikal bakalnya dari NU (Nahdatul Ulama)
3. PDI Perjuangan adalah singkatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan organisasi partai politik peserta pemilu dan merupakan partai yang berhaluan pancasila dan nasionalis.
4. Pemilukada adalah singkatan dari pemilihan umum kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati atau walikota yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Bargaining politik adalah proses tawar menawar (kepentingan politik).
6. Lobi politik adalah aktivitas komunikasi dan suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Meleong, 2000:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru (DPW Partai Kebangkitan Bangsa, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau).

### **2. Informan Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat dalam proses pencalonan Bupati Kabupaten Siak. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel *nonprobability* yaitu dengan cara *purposive sampling* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2009: 91).

Dalam *purposif sampling*, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan obyek untuk diteliti. Jelas bahwa nilai penelitian yang diperoleh berdasarkan sampel ini

tergantung pada peneliti yang memberi pertimbangan (Syarifudin Hidayat, 2002:131-132).

**Tabel . Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan
1	Abdul Wahid	Ketua DPW PKB Riau
2	Ricky Hariansyah	Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB Riau
3	Afifuddin	Wakil Sekretaris DPW PKB Riau
4	Suyatno	Sekretaris Umum DPD PDIP Riau
5	T. Rusli Ahmad	Wakil Ketua DPD PDIP dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Riau
6	Mafirion	Ketua Tim Sukses Koalisi
7	Mustafa, S.Sos	Wakil Sekretaris PKB Provinsi Riau
7	Sofyan Hadi, S.Sos, M.Si	Akademisi UR
	Baskoro, S.Ip, M.Ip	Akademisi UR

*Sumber : Data Olahan Penulis tahun 2013*

### **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data:

#### **1. Data Primer**

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan yang dilakukan dengan interview (wawancara). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk membantu agar wawancara tidak lari dari topik dan tujuan yang ingin diperoleh, sehingga informasi yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data ini adalah data yang diolah atau ditulis orang lain, data ini diperoleh dari majalah, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, koran dan tulisan-tulisan diinternet. Selain itu data sekunder juga dapat dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

### **4. Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode:

1. *Indepth interview* (wawancara mendalam), yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu (P. Joko Subagyo, 2004:94).

Penelitian ini bersifat deskripsi dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti akan menjawab tujuan penelitian ini.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (versetehen), yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. (Lexi J. Meleong, 2000: 9).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Kehadiran suatu Partai Politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti, bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.

### **1.1. Faktor Pendorong terbangunnya Koalisi**

#### **a. Faktor Kesamaan Visi dan Misi**

Proses Koalisi akan menjadi lebih demokratis dan terbuka, ketika ada persamaan Visi dan Misi dari Partai Politik, hal ini akan berdampak positif dalam jalannya suatu Pemerintahan. Dalam hal ini baik secara substansi maupun sistimnya akan mengacu kearah yang lebih baik. Pada saat sekarang ini proses Koalisi Partai politik telah dilakukan dan hasilnya dapat dikatakan efektif, dengan adanya persamaan visi dan misi maka rakyat dapat mengetahui kredibilitas masing-masing kandidat dalam pemilu, saat ini pejabat publik (pemilihan kepala daerah) sudah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga akan memperoleh pejabat publik yang lebih berkualitas, aspiratif dan representatif dibanding selama ini yang selalu menimbulkan konflik berkepanjangan dikarenakan adanya perbedaan visi dan misi . Oleh sebab itu persyaratan yang lebih ketat dalam penentuan koalisi



partai politik sebagai penyelenggara pemerintahan menjadi sangat strategis dalam proses Pemilihan Umum.

Persamaan visi dan misi mutlak dibutuhkan dalam membangun solidaritas partai koalisi, keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk memberantas kemiskinan di Riau. hal inilah yang menjadi langkah awal terbentuknya koalisi partai PDIP dan PKB. dimana berdasarkan sebelumnya Partai PDIP akhirnya mengutus Suryadi untuk menjadi wakil dalam koalisi partai yang sengaja dibentuk tersebut. Suryadi Kushaini layak menjalankan visi dan misi PDIP yang tidak jauh berbeda dengan PKB, bahkan visi dan misi keduanya dapat dikatakan sama. Sehingga dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pihak koalisi tersebut akan menyusun strategi bagi kemenangan Lukman Edy untuk menjadi Gubernur Riau mendatang.

Mekanisme rekrutmen yang menghasilkan koalisi dua pasangan tersebut dilaksanakan secara terbuka, dalam model rekrutmen terbuka, dimana kedua belah pihak saling memuji satu sama lainnya, akan tetapi, hal lain yang terjadi adalah Bupati Indragiri Hilir, Indra Muchlis Adnan yang akan tetap maju sebagai bakal Calon Gubernur Riau September 2013 mendatang, sekalipun harus bertarung dengan adik kandungnya sendiri Lukman Edy. Hal inilah yang turut menjadi pertimbangan bagi Lukman Edy sendiri, dimana rival yang dihadapi tidak hanya Figur-figur hebat, melainkan abang kandungnya sendiri, sehingga hal ini menuntut pihak dari Indra Muklis berkomentar.

Adanya kesepakatan kedua partai mengajukan nama Suryadi Khusaini dan Lukman Edy seperti yang diklaim DPW PKB Riau. Dalam hal ini Partai PKB dan PDIP dikenal sebagai partai yang memiliki Figur-figur berpengalaman dan memiliki karir yang gemilang baik Lokal maupun Nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Lukman Edy juga merupakan Menteri Indonesia pada pemerintahan SBY pada sebelumnya, sehingga hal ini menuntut terjadinya koalisi bagi kedua belah pihak yaitu antara PKB dan PDIP.

Ditambah lagi kedua partai ini memiliki visi dan misi yang sama. Sehingga dengan terciptanya kader-kader yang berkualitas tersebut, menuntut partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. sehingga dapat tercipta kader-kader yang memiliki kemampuan Individu atau kelompok yang baik.

#### **b. Faktor Kemampuan dan Pengalaman**

Faktor kemampuan dan Pengalaman dinilai sangat penting karena seseorang dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik yang berkoalisi. Semua factor-faktor tersebut perlu kita kaji dan fahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian dan pengalaman untuk terjun ke dalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria

tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan parta-partai tertentu.

Kemampuan dan pengalaman memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas individu itu sendiri.

Rekrutmen antara PKB dan PDIP dilakukan bukan Berdasarkan Ideologi, akan tetapi dilandaskan atas dasar kepentingan untuk menggabungkan antara Popularitas, pengalaman dan besarnya Partai, dan pada umumnya pemilukada mengesampingkan ideologi, kecuali ditingkat nasional yang mengutamakan ideologi. Kekuatan Lukman Edi dari Popularitas dan Suryadi dari Pencalonan sebelumnya. Sehingga muncul inisiatif dari DPP untuk menggabungkan antara keduanya. Artinya setiap individu harus mempunyai *skill* yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu Negara ataupun daerah.

Saat ini koalisi PKB dengan PDIP masih tetap solid, dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP tentang pengusungan Lukman Edy yang rencananya Februari telah selesai, dalam hal ini digunakan sebagai syarat pendaftaran untuk maju di Pilgubri. Faktor Kemampuan dan Pengalaman yang saling melengkapi akan mampu memberikan tidak hanya bagi Provinsi Riau tetapi juga bagi partai koalisi itu sendiri.

Langkah pasti bagi Lukman Edy untuk maju sebagai Gubernur Riau masih sangat terbuka lebar, Pengalaman yang intensif dan tingkat kecerdasan yang tinggi dapat membuahkan suatu *intuition* yang lebih tepat dan benar. *Intuition* yang benar dan tepat akan sangat berguna dalam berbagai kasus tertentu. Kadangkala seorang pemimpin akan dihadapkan oleh berbagai informasi maupun fakta yang masih kurang memadai dari segi kecukupan bahan maupun tingkat kredibilitasnya yang lebih rendah, tetapi harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Pada saat itulah, tingkat *intuition* memiliki peranan penting karena tidak adanya informasi yang cukup sehingga secara logis dapat diperdebatkan.

Kolisi tidak harus dibangun berdasarkan ideologi partai, melainkan dengan adanya kepentingan dari keduanya, koalisi itu mudah untuk dibangun dan inilah yang memang terjadi di Provinsi Riau saat ini. Koalisi keduanya juga dibangun dengan menggabungkan popularitas dan besarnya partai, akan tetapi Lukman Edy pada dasarnya memang lebih dikenal di Provinsi Riau.

Fungsi Koalisi Partai politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam jika koalisi itu tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya kiprah di dunia politik. Peran partai politik sebagai sarana Koalisi dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kader-kader yang

dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Sukarna (1990: 34) mengatakan bahwa apabila pencalonan politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi kelanggengan partai politik.

### c. Faktor Sosio-Kultural

Semangat yang mengutamakan putra daerah dalam memimpin suatu wilayah sebenarnya hal yang biasa terjadi. Tidak terkecuali di Provinsi Riau, hal ini adalah merupakan suatu reaksi atas segala bentuk intervensi masa lalu oleh pemerintahan pusat (dengan corak khas yang militeristik, serba terkomando), yang lalu menghasilkan pendekatan feodalistik, serba sentralistik dalam pengelolaan daerah.

Penerapan Sosio-Kultural yang mengutamakan suku asli daerah dalam pemilihan Gubernur Riau adalah merupakan pilihan terbaik, hal ini didasarkan karena suku asli daerah sanggup mengembalikan potensi daerah yang telah terampas oleh pusat, dan mampu memunculkan berbagai program penunjang kesejahteraan masyarakat Riau untuk saat ini. Akan tetapi hal ini dapat memunculkan kekhawatiran yang bisa dinalar bahwa proses globalisasi akan mereduksi identitas yang selama ini dibanggakan. Namun, hal tentang pembeda dalam konteks Sosio-Kultural, bukan terpresentasi dalam bentuk reservasi terhadap suku asli daerah. Sebaliknya, pembeda itu terletak pada kapabilitas dan profesionalitas dari berbagai pihak untuk bisa membawa wilayah itu pada satu tujuan yang dikehendaki bersama.

Tradisi mengutamakan putra daerah akan tetap berlangsung seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang intensif tentang daerahnya sendiri. Oleh karena itu Sosio-Kultural dalam Pemilihan Umum merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan mengoptimalkan potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya. Perkembangan daerah yang sesuai dengan karakteristiknya ini akan mengurangi kesenjangan antar daerah yang selama ini terakumulasi, dan pada akhirnya dapat mencegah disintegrasi bangsa.

Konsep *good governance* memfokuskan dalam beberapa aspek, *Pendidikan politik*; pemberian otonomi akan memberi peluang lebih besar bagi partisipasi politik. *Melatih kepemimpinan politik*; pemerintah daerah yang otonom akan memberi pengalaman mengenai sistem kepartaian, peran legislatif, metode formulasi kebijakan. *Stabilitas politik*; sistem pemerintahan yang terdesentralisasi akan memungkinkan terciptanya demokrasi yang stabil karena masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka percayai. *Persamaan politik*; dengan menyediakan peluang partisipasi dalam pembuatan kebijakan, pemerintahan yang otonom akan menjamin persamaan politik warganya. *Akuntabilitas*; Setiap hak individual akan lebih terjamin sehingga masyarakat lebih bebas. *Responsivitas* (*daya-*

*tanggap*); Pemerintahan yang otonom akan mampu menyediakan apa yang dikehendaki oleh rakyat.

#### **b. Faktor Partai Pendukung**

Koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting didalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-kolisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya Koalisi dalam partai politik tidak terlepas dari peranan Partai Politik itu sendiri. Terbentuknya koalisi ini terjadi pada detik detik akhir, dimana pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan pilihannya dengan partai apa akan berkoalisi. Pada saat detik detik akhir resmi mendaftarkan diri ke KPU Riau pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 di Jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepakat berjalan seiring mengusung Lukman Edy dan Suryadi Khusaini dalam Pemilihan Gubernur Riau 2013 mendatang. Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan kedua partai di RM Sri Mersing di Pekanbaru dan berkoalisi dengan PDIP dalam menghadapi Pilgubri. Kita akan mengusung kader masing-masing untuk maju dan menyiapkan strategi pemenangan dan DPW PKB Riau dengan kepemilikan 3 kursi parlemen plus 7 kursi PDIP sudah dapat mengajukan satu paket calon. Setelah koalisi dengan PDIP tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan koalisi dengan Partai lainnya yang sama-sama mengusung program Pro Rakyat. Untuk menuju rencana itu, PKB secara intensif terus membangun komunikasi politik dengan partai lain. Terutama dengan partai-partai yang menjadi koalisi PKB di DPRD Riau seperti Gerindra, PBB, PKS dan PDIP serta PBR, Terkait dengan finansial. Dengan Komunikasi politik bisa saja memberikan kemudahan. Soal dana bukan jadi persoalan utama sebab tidak ada jaminan juga calon kaya jadi pemenang. Tetapi hubungan baik lebih berpotensi memberikan hasil baik oleh karena itu walaupun PKB hanya 3 kursi di DPRD Riau, kita tetap yakin dengan membangun komunikasi politik semuanya bisa terjadi.

Tidak jaminan kursi banyak akan menjadi pemenang. Akan tetapi dengan Bergabungnya tim BIMA akan dapat menambah kekuatan bagi pasangan LURUS untuk bisa memenangkan pilgubri 2013. Karena dengan dukungan tim BIMA akan menambah solid tim-tim LURUS yang saat ini sudah mulai bekerja. Yaitu tim koalisi PDIP-PKB, tim internal PDIP, tim internal PKB memfokuskan kinerja pada pemilih pemula (muda) plus tim BIMA dan Lukman Edy juga merupakan tokoh politik muda yang telah berkiprah di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari dapil Riau 2, pernah menjabat posisi strategis di PKB yaitu Sekretaris Jendral (Sekjend) dan posisi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

### 3.2. Perolehan Suara Putaran Pertama per Kabupaten Kota

Lukman Edy dan Suryadi

Pekanbaru	: 29.333
Kampar	: 30.083
Rohul	: 12.027
Rohil	: 15.405
Inhu	: 24.726
Inhil	: 116.987
Pelelawan	: 22.765
Kuansing	: 17.886
Siak	: 20.555
Bengkalis	: 23.030
Dumai	: 10.455
Kep. Meranti	: 9.649
<b>Total</b>	<b>: 333.621</b>

Dari hasil rekapitulasi pasangan lukman Edy dan Suryadi Kushaeni memperoleh total suara 333,621 dan berada di Posisi ke empat. Akan tetapi dari hasil ini koalisi antara keduanya tetap terjalin baik. tapi dalam dukungan Pilgubri putaran II belum ada kata sepakat kemana arah nantinya karena masing-masing partai punya pendapat yang berbeda. Karena hal ini harus dirapatkan di internal partai. Pada dasarnya koalisi itu dibangun berdasarkan kepentingan, dan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya suatu partai. meskipun koalisi antara PDI P dan PKB terjalin dengan solid dan kompak dalam menghadapi setiap menghadapi setiap gangguan. Akan tetapi pernyataan yang berbeda dari pihak PKB yang hanya menyatakan bahwa Koalisi hanya dilakukan pada saat pilgubri Putaran I.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dari hasil uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pendorong Koalisi antar PKB dan PDIP adalah :

- Koalisi PKB dan PDIP terjadi karena Lukman Edy yang merupakan seorang menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu keduanya merupakan sosok yang muda dan memiliki pengalaman politik yang cukup mumpuni. Terbentuknya koalisi ini terjadi pada detik detik akhir, dimana pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan pilihannya dengan partai apa akan berkoalisi.
- Faktor kesamaan Visi dan Misi artinya kedua partai memiliki kesamaan tujuan yang akan dicapai. Pasangan lukman Edy dan Suryadi Kushaeni di Sahkan berdasarkan MOU dengan pertimbangan dari jumlah kursi yang ada di DPRD dan juga faktor kapabilitas atau kemampuan kedua belah pihak.

- c. Faktor sosio-kultural, artinya Tradisi Pemilihan Umum di provinsi Riau dibentuk berdasarkan sosio-Kultural yang mengutamakan suku asli riau yang menjadi Gubernur, sehingga berdasarkan hasil Koalisi memutuskan bahwa Lukman Edy sebagai Gubernur dan Suryadi sebagai wakil gubernur Riau.
- d. Faktor pengalaman dan kemampuan, artinya Adanya Inisiatif dari DPP kedua partai untuk menggabungkan antara dua sosok yang memiliki kemampuan masing-masing, Lukman Edy memiliki pengalaman yang baik di kanca Nasional dan Suryadi mempunyai basis besar di suara Suku jawa yang ada di Riau.
- e. Koalisi keduanya dibangun juga atas dasar kepentingan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Riau.
- f. Faktor partai pendukung, artinya Koalisi dibangun berdasarkan banyaknya dukungan partai.

## 2. Saran-saran

Dari permasalahan di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Masyarakat Riau harus bersikap kritis terhadap mekanisme dan kredibilitas calon kepada daerah agar siapapun yang terpilih dapat sesuai dan pro terhadap masyarakat yang ada di Provinsi Riau.
- b. Pemimpin yang terpilih harus bisa mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat kesejahteraan, politik dan sosial budaya Riau dan memiliki berbagai karakter yang sesuai dengan kondisi Provinsi Riau pada saat sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Sumber Buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Cipto, Bambang. 1996. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward J dkk, 2011. *Manajemen Biaya Penekanan Strategis*. Jakarta : Salemba Empat
- Firmanzah, 2008. *Mengelolah Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haris, Syamsudin. 1993. *Pemilu, Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Modern*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Meleong, Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J. Joko, Prithatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nogi, Hesel Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Panuju, Redi. 2009. *Oposisi Demokrasi dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Rush, Michael & Philp Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Surbakti. Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

**b. Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.